

## PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA BILA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**Rifni Nikmat Syarifuddin\*<sup>1</sup>, Muh. Irwan<sup>2</sup>, Saifullah<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Jl. Angkatan 45, Lt. Salo

E-mail: \*<sup>1</sup>rifnikmat@gmail.com, <sup>2</sup>irwanirwan41083@gmail.com,

<sup>3</sup>ifulsidrap06@gmail.com

### Abstrak

Produksi tanaman padi di Kabupaten Sidrap dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap kesempatan kerja, sumber pendapatan serta perekonomian regional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil pembangunan disektor pertanian dapat diukur dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang disumbangkan. Namun peningkatan produksi setiap tahunnya ternyata tidak memberikan sumbangan pada PDRB secara signifikan bahkan mengalami penurunan khususnya di Desa Bila. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah kelompok tani di Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 105 orang dari 15 kelompok dan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 53 orang dengan teknik *random sampling*. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persentase indikator perencanaan pembangunan tertinggi hingga terendah secara berturut-turut yaitu konsistensi dan realistis (83,25%), perilaku dan hubungan variabel ekonomi (81,00%), pengawasan yang kontinu (78,75%), aspek fisik (76,41%), dan tujuan pembangunan (70,25%). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan pertanian termasuk kategori baik, namun belum maksimal karena model pengawasan yang digunakan adalah pengawasan tidak langsung, selain itu dalam perencanaan sangat dibutuhkan saran dari masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

**Kata kunci :** Perencanaan pembangunan, sektor pertanian

### Abstract

*Production of rice plants in Sidrap Regency from 2014 to 2017 has increased every year, so this allows the potential of Sidrap Regency in the agricultural sector to be very high. In this regard, the results of development in the agricultural sector can be measured by the value of the PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) donated. but the increase in production every year apparently did not contribute to the PDRB significantly and even decreased, especially in Desa Bila. The research method used was quantitative descriptive and the population in this study were farmer groups in the Dua Pitue, Sidenreng Rappang, amounted to 105 people from 15 groups and the samples used were 53 people with random sampling techniques. Based on the results of the study it can be seen that the highest to lowest percentage of development planning indicators are consistency and realistic (83.25%), behavior and relationship of economic variables (81.00%), continuous supervision (78.75%), physical aspects (76.41%), and development goals (70.25%), this shows that agricultural development planning is categorized as good, but not maximized because the supervisory model used is indirect supervision, besides that in planning it is very much needed advice from the people who are the target of development.*

**Keywords:** Development planning, agricultural sector

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduknya, dengan demikian sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Di Indonesia,

pembangunan di sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentifikasi pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan.

Dengan demikian, pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Perencanaan pembangunan adalah tahapan awal dalam proses kegiatan pembangunan sebelum pelaksanaannya. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan seharusnya penanganan suatu masalah secara menyeluruh dan holistik merupakan pandangan perencanaan pembangunan.

Widodo (2006) Perencanaan merupakan upaya suatu institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan

yang dimiliki oleh wilayah tersebut. proses perencanaan (*planning process*) sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yang diawali dengan pemilihan tujuan sosial, kemudian menetapkan berbagai target ekonomi yang diusul dengan menyusun suatu kerangka kerja bagi kegiatan-kegiatan implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan (Todaro dan Smith, 2006).

Perencanaan pembangunan dapat dinilai baik jika mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut (Kunarjo, 2002): (1) Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan, (2) Perencanaan harus konsisten dan realistis, (3) Perencanaan harus dibarengi dengan pengawasan yang kontinu, (4) Perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan, (5) Para perencana harus memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi, (6) Perencanaan harus mempunyai koordinasi.

Menurut Robbins dan Coulter dalam Ernie Trisnawati menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses yang bermula dari penetapan tujuan organisasi, dan kemudian dilanjutkan dengan mencari dan menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh,serta merumuskan system perencanaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh langkah-langkah yang digunakan hingga tercapainya tujuan organisasi.

Ada lima tujuan perencanaan pembangunan menurut UU 25/2004, yaitu: [1] Mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan, [2] Mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda (pusat maupun daerah), [3] Menghubungkan dan menyelarakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, [4] Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, [5] Memanfaatkan sumber daya dengan baik. Menurut Shah (2007), menyatakan bahwa sifat konsistensi dan

realistis antara perencanaan dan penganggaran adalah upaya untuk melaksanakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Konsistensi yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sangat penting dalam menciptakan *outcome* pengelolaan keuangan public yang optimal, yaitu: [1] Teralokasinya sumber pembiayaan publik pada urusan, program dan kegiatan strategis, [2] Terciptanya efisiensi penge-lolaan keuangan daerah [3] Terciptanya disiplin fiscal.

Berdasarkan hasil penelitian Burin (2015) menunjukkan bahwa terdapat beberapa dokumen yang tidak konsisten antara perencanaan dan penganggaran pemerintah Kabupaten Lembata dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan dokumen yang paling inkonsisten adalah RPJMD-RKPD, sementara program yang memiliki resiko inkonsistensi sangat tinggi adalah pembangunan infrastruktur.

Menurut Mills dan Mills (2000) mendefinisikan organisasi merupakan kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimaksud organisasi disini adalah BAPPEDA melakukan fungsinya yaitu penyelenggaraan pengkoordinasian dengan berbagai SKPD dan Dinas-dinas yang terkait yang terkait hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian Anwar (2016) bahwa didalam penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA berkoordinasi dengan salah satu SKPD yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam mekanismenya sudah tertuang pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 tahun 2013 yang dimana BAPPEDA sebagai penunjang dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan Dinas Cipta Karya sebagai pelaksana pembangunan.

Desa Bila merupakan bagian dari wilayah Sulawesi Selatan dimana

sektor perekonomiannya lebih banyak didominasi dan ditunjang oleh sektor pertanian, hal ini sesuai dengan potensi wilayah yang sebagian besar masih merupakan lahan pertanian.

Produksi tanaman padi di Kabupaten Sidrap dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya (gambar 1), sehingga hal ini memungkinkan potensi wilayah Kabupaten Sidrap di sektor pertanian sangat tinggi. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang menjadi andalan di Kabupaten Sidrap.

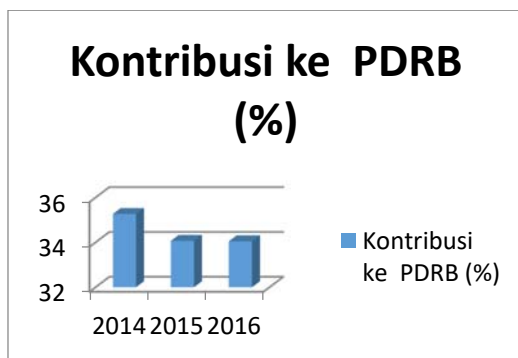
Gambar 1. Data grafik luas lahan pertanian di Kabupaten Sidrap



Sumber data: BPS Kabupaten Sidrap, 2017

Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap kesempatan kerja, sumber pendapatan serta perekonomian regional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil pembangunan disektor pertanian dapat diukur dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang disumbangkan. namun peningkatan produksi setiap tahunnya ternyata tidak memberikan sumbangan pada PDRB secara signifikan bahkan mengalami penurunan.

Gambar 2. Data grafik kontribusi sektor pertanian ke PDRB kabupaten Sidrap



Sumber data: BPS Kabupaten Sidrap, 2017

Berdasarkan hasil penelitian Elis Susanti, 2017 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dengan nilai setiap kenaikan satu persen pada PDRB maka kesejahteraan akan meningkat sebesar 1,644119%. Berdasarkan data grafik diatas

Namun dalam kenyataannya potensi wilayah khususnya di bidang pertanian di Desa Bila tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana, hasil observasi awal peneliti yang berkaitan tentang pengaruh perencanaan pembangunan sektor pertanian terhadap peningkatan ekonomi desa, upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan belum sesuai apa yang di harapkan oleh masyarakat petani dalam hal ini seperti bantuan-bantuan yang diperuntukkan untuk petani masih belum tepat sasaran yang berfungsi sebagai penunjang peningkatan hasil pertanian seperti saluran irigasi yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi oleh petani. Serta pembelian hasil pertanian oleh pedagang tidak sesuai kebijaksanaan harga. Oleh karena itu diperlukan pembangunan sektor pertanian yang akan membuat masyarakat petani dapat mandiri dan berdaya dalam mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis indikator-indikator yang dapat mengukur perencanaan pembangunan, adapun indikator yang digunakan yaitu [1] Tujuan Pembangunan, [2] Konsisten Dan Realistis, [3] Pengawasan Yang Kontinu, [4] Mencakup Aspek Fisik, [5] Memahami Prilaku Dan Hubungan Antarvariabel Ekonomi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Di Desa Bila Kecamatan Dua Pitue’.

## METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan yaitu adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2003), Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian dan populasi dalam penelitian ini adalah kelompok tani di Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 105 orang dari 15 kelompok dan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 53 orang dengan teknik *random sampling*. Teknik pengukuran untuk variabel penelitian menggunakan Skala Likert dengan menggunakan skala interval dalam menentukan kriteria jawaban responden dan terdapat empat kriteria jawaban yang digunakan yaitu sangat baik, baik, kurang baik dan tidak baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- [1] Observasi, melalui pengamatan langsung di lapangan atas kenyataan dan permasalahan utama yang terjadi secara obyektif dilapangan.
- [2] Interview, melalui wawancara berstruktur dan bebas secara mendalam terhadap informan atau nara sumber.
- [3] Kuisioner, yaitu cara pengumpulan data yang digunakan dengan mengedarkan sejumlah angket kepada responden dalam penelitian ini yang dianggap mampu memberikan informasi atau data yang diperlukan.

- [4] Studi Pustaka, melalui kajian literatur, dokumen, peraturan dan undang-undang serta kajian referensi lainnya

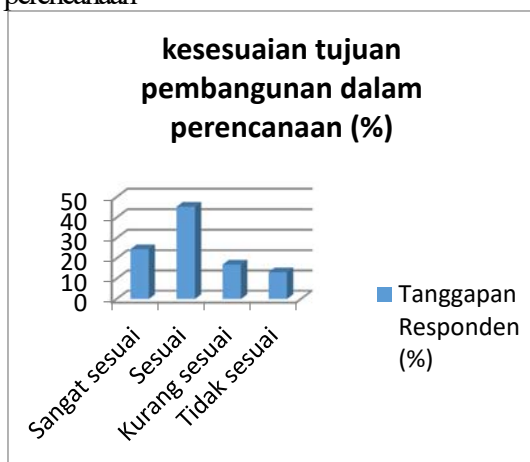
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan

Salah satu aspek dalam upaya pencapaian keberhasilan pembangunan sektor pertanian dalam peningkatan ekonomi adalah tujuan pembangunan yang merupakan sasaran atau hasil yang ingin dicapai pada pembangunan sector pertanian seperti peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian (gambar 3) maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata persentase untuk indikator kesesuaian perencanaan dengan tujuan pembangunan yaitu 70,25%, angka ini menunjukkan bahwa walaupun tujuan pembangunan dalam perencanaan termasuk dalam kategori baik, namun masih terdapat beberapa perencanaan yang masih kurang sesuai dengan tujuan pembangunan.

Gambar 3. Data grafik tanggapan responden tentang kesesuaian tujuan pembangunan dalam perencanaan



Sumber data: Data Primer, 2018

Tujuan pembangunan dalam sektor pertanian tentunya berkaitan dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan petani yaitu dengan adanya peningkatan produksi hasil pertanian dan berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebelum melakukan perencanaan pembangunan, terlebih dahulu dilakukan penyampaian informasi mengenai tujuan pembangunan dengan menggunakan metode sosialisasi kepada masyarakat, kemudian melibatkan kelompok masyarakat tersebut dalam menyusun rencana pembangunan dengan tujuan memperoleh saran mengenai kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pembangunan.

Sosialisasi mengenai tujuan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan saran yang merupakan tahap awal dalam proses perencanaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Riyadi & Deddy Supriady B. (2005: 7) yang mengartikan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan diartikan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas.

### B. Konsistensi perencanaan dalam pembangunan pertanian

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran memiliki peranan yang sangat penting dan perlu untuk

diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan yang konsisten khususnya dalam hal penganggaran sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perencanaan haruslah konsisten dan realistis. Perencanaan idealnya sebagai suatu proyeksi kedepan senantiasa memperhitungkan keadaan masa kini yaitu potensi masa kini seperti sumber daya manusia, sumber daya alam dan juga modal serta kelebihan serta kekurangannya pada masa yang akan datang.

Tabel 1. Tanggapan responden tentang konsistensi perencanaan pembangunan pertanian

Tanggapan Persentase	responden
Sangat konsisten	41,51%
Konsisten	50,94%
Kurang konsisten	7,54%
Tidak konsisten	0%

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka nilai rata-rata persentasenya yaitu 83,25%, angka ini menunjukkan bahwa konsistensi perencanaan pembangunan pertanian di desa Bila Kab. Sidenreng Rappang termasuk dalam kategori baik.

Hasil penelitian tentang konsistensi dan realistis perencanaan pembangunan di Desa bila mencapai angka 83,25%. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa

konsistensi pembangunan sektor pertanian sesuai dengan perencanaan karena mulai dari perencanaan sampai ketahap terakhir pelaksanaan program pembangunan, masyarakat ikut berpartisipasi memberi saran, ide hingga melakukan pengawasan.

### C. Pengawasan yang *continue* dalam perencanaan pembangunan pertanian

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Hal ini sejalan dengan pendapat (Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005) bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/*plan*).

Berdasarkan hasil penelitian dibawah (tabel 2) dapat diketahui bahwa pengawasan dalam perencanaan pembangunan di sektor pertanian telah dilakukan dengan baik yaitu dengan nilai rata-rata persentase 78,75%, walupun masih ada pendapat responden sebanyak 20,75% yang mengatakan kurang baik. Hal ini dapat terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat merupakan jenis pengawasan tidak langsung.

Tabel 2. Tanggapan responden tentang pengawasan yang *continue* dalam perencanaan pembangunan pertanian

Tanggapan Persentase	responden
Sangat baik	35,85%
Baik	43,40%
Kurang baik	20,75%
Tidak baik	0%

Sumber : Data Primer, 2018

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan

dari jarak jauh, karena pimpinan tidak terjun langsung untuk mengawasi para bawahannya. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengawasan tidak langsung yaitu sebagai berikut: Definisi dari pengawasan tidak langsung yang dikemukakan oleh Sarwoto (1998:101) adalah: “Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan.” Sedangkan menurut Siagian (2005:115), pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut dapat berupa laporan lisan dan laporan tulisan.”

Menurut pendapat Terry (2003:168) adalah: “Laporan lisan berisikan tentang hasil-hasil wawancara dan diskusi-diskusi kelompok, sedang laporan tulisan memuat tentang uraian-uraian atau data statistik. Laporan-laporan lisan cukup baik untuk situasi-situasi yang dapat diadakan tanya jawab, terutama untuk menghilangkan kesalahpahaman atau untuk mendapatkan tambahan informasi. Laporan-laporan tertulis akan baik bila bersifat komprehensif dan mengandung informasi-informasi yang mendetail

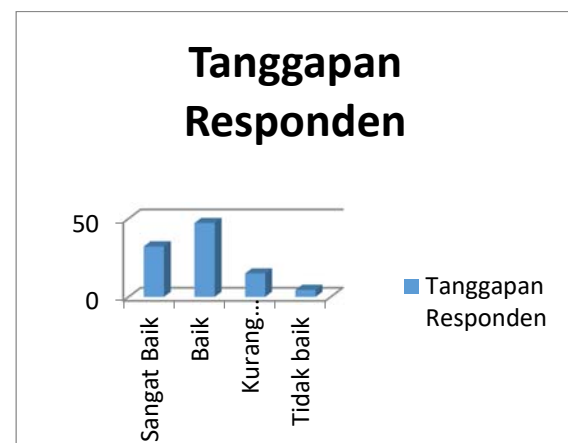
Pengawasan tidak langsung merupakan jenis pengawasan yang tidak langsung dilakukan oleh kepala desa atau anggota BPD di tempat pelaksanaan pembangunan atau kata lain tidak secara *on the spot*. Hal ini sejalan dengan dengan pendapat Siagian (2003) yang menyatakan bahwa pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dari jauh dengan menggunakan laporan yang telah disampaikan sebelumnya baik tertulis maupun lisan.

#### D. Aspek Fisik

Selain kesesuaian tujuan pembangunan, konsistensi dan pengawasan yang berkelanjutan, terdapat hal lain yang perlu dikaji dalam proses perencanaan pembangunan yaitu dengan mempertimbangkan dan menganalisis aspek fisik yang akan mempengaruhi baik itu menghambat atau mendukung proses pembangunan pertanian seperti keadaan alam, topografi, dll.

Berdasarkan hasil penelitian (gambar 4) dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai aspek fisik dalam pembangunan termasuk kedalam kategori baik dengan rata-rata persentase 76,41%. Hal ini disebabkan karena desa Bila merupakan daerah yang memiliki aspek fisik yang sangat mendukung dalam proses pembangunan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pula bahwa dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat memberikan saran yang sesuai dengan kebutuhan dan secara secara aspek fisik juga mendukung.

Gambar 4. Data grafik tanggapan responden tentang aspek fisik dalam pembangunan sektor pertanian



Sumber : Data Primer, 2018

#### E. Perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi

Proses pembangunan ekonomi hanya berjalan lancar apabila semua lapisan masyarakat saling memberikan dukungan. Pembangunan sector pertanian merupakan

pembangunan yang akan menyentuh semua aspek kehidupan manusia, dengan mempertimbangkan bahwa sector pertanian merupakan sector utama dalam mata pencaharian masyarakat desa Bila, Kecamatan Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi dalam perencanaan pembangunan pertanian termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata persentase yaitu 81,00%.

Tabel 3. Tanggapan responden tentang perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi dalam perencanaan pembangunan pertanian

Tanggapan Persentase	responden
Sangat baik	33,96%
Baik	56,60%
Kurang baik	9,43%
Tidak baik	0%

Sumber : Data Primer, 2018

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa:

- [1] Perencanaan pembangunan pertanian di desa Bila termasuk kategori baik, namun belum maksimal.
- [2] Persentase indikator perencanaan pembangunan tertinggi hingga terendah secara berturut-turut yaitu konsistensi dan realistis (83,25%), perilaku dan hubungan variabel ekonomi (81,00%), pengawasan yang kontinu (78,75%), aspek fisik (76,41%), dan tujuan pembangunan (70,25%).

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- [1] Perencanaan pembangunan di sektor pertanian haruslah lebih di sesuaikan dengan tujuan perencanaan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- [2] Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu ditingkatkan.

### TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah memberikan dukungan material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Siagian, Sondang, P., 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Widodo, 2006, *Perencanaan Pembangunan Era Otonomi Daerah*, UPPSTIMYKPN, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi*, edisi kesembilan, jilid I, Erlangga, Jakarta.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kumiawan Saefullah, 2008, *Pengantar Manajemen*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Shah, Anwar, 2007, *Local Public Financial Management*. The World Bank, Washington DC.
- Burin, Ferdinandus Diri, Candra Fajri Ananda, David Kaluge, 2015, Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah. *Ekonomika-Bisnis*, Vol. 6 No. 2 Bulan Juli, Hal 177-188 <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb>



- Susanti, Elis, 2017, Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2019 Perspektif Ekonomi Islam, *skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.
- Arikunto, Suharsimi, 2003, *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*, Bina Aksara, Jakarta.
- Anwar, M. K., 2016. Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Kota Samarinda. 4 (1): 2305-2319. ISSN 0000-0000, [ejournal.an.fisip-unmul.org](http://ejournal.an.fisip-unmul.org)
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sarwoto, 1998, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2005, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Terry, George R, 2003, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.